KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

# LAPORAN INOVASI DAERAH

**Pemerintah Daerah: Kabupaten Natuna**

**Nomor Registrasi: 21.03-162580-2023**

## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1. Nama Inovasi

eKEJAP Sistem Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

### 1.2. Dibuat Oleh

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembagan Daerah ( bp3d )

### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

### 1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

### 1.5. Nama Inisiator

CATUR BUDIYONO, S.Kom

### 1.6. Jenis Inovasi

Digital

### 1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

### 1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

### 1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

## 1.9. Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan

## 1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah. Dalam melaksanakan pengendalian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota/Kabupaten.

Keberhasilan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang merupakan tugas pokok Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah akan di laporkan setiap tahunnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) menuangkan laporan antara target target kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dengan realisasi kinerja.

Dalam menetapkan isu prioritas/ *core issue*, dapat digunakan teknik tapisan isu dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Analisi USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas isu masalah dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan dan perkembangan setiap variable dengan metode teknik scoring. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Urgensy*(urgensi)yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesai
2. *Seriousness*(keseriusan)dilihat dari seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan
3. Growth(berkembangnya masalah)dilihat dari seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera ditangan

Berdasarkan hasil scoring analisis isu diatas maka dapat kita ketahui bahwa belum efektifnya waktu evaluasi kinerja pembangunan merupakan isu yang paling dominan. Isu itu di karenakan Natuna belum memiliki system/ aplikasi dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan belum adanya system/ aplikasi evaluasi kinerja pembangunan daerah maka dapat berakibat pada kurang efektifnya waktu evaluasi kinerja yang harus dilaksanakan pada setiap triwulan. Untuk lebih mengefektifkan waktu

evaluasi kinerja pembangunan maka akan di bangun suatu Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (***SEKejaP***).

## 1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan penyusunan aksi perubahan adalah untuk lebih mengefektifkan waktu evaluasi pembangunan daerah baik waktu evaluasi rencana kerja (Renja) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna setiap triwulan. Dalam penyusunan aksi perubahan dibagi dalam 3 tahapan yaitu:

**a. Jangka Pendek**

Dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan berlangsung maka target yang akan di kerjakan adalah terbangunnya Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (***SEKejaP***)

**b. Jangka Menengah**

Setelah kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, system ini akan digunakan dalam evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan II baik untuk pengukuran kinerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun di seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Natuna

**c. Jangka Panjang**

Dalam jangka panjang system ini akan di gunakan untuk evaluasi RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) semester II tahun 2023

## 1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang di harapkan dari penyusunan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (***SEKejaP***) bagi perangkat daerah adalah dapat mempermudah dalam menyusun evaluasi kinerja dari masing-masing perangkat daerah. Sedangkan manfaat bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah dapat mempercepat pemintaan data evaluasi kinerja perangkat daerah per triwulan, ketepatan waktu penyusunan laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) per triwulan yg akan disampaikan ke Provinsi Kepulauan Riau. Yang paling penting adalah meningkatnya kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelayanan publik

## 1.13. Hasil Inovasi

Adapun kondisi yang diharapkan dengan adanya perubahan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

1. Efektifnyawaktu evaluasi kinerja pembangunan
2. Optimalnya penyajian data target danrealisasi tahun sebelumnya
3. OptimalnyaSDM dalam menyajikan data hasil evaluasi

## 1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

21-06-2023

### 1.15. Waktu Implementasi

21-06-2023

### 1.16. Anggaran

-

### 1.17. Profil Bisnis

-

### 1.18. Dokumen HAKI

-

### 1.19. Penghargaan

-

### 1.20. Koordinat

3.9232005597364723, 108.338434457693

### 1.21. Kematangan

49.00

## 2. INDIKATOR INOVASI

| No. | Indikator SID | Informasi | Bukti Dukung |
|---|---|---|---|
| 1. | Regulasi Inovasi Daerah | Peraturan Kepala Daerah | • Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 |
| 2. | Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah | Lebih dari 30 | • SK tentang Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (ekejap) Berbasis Website |
| 3. | Dukungan Anggaran | Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0) | • DPPA BP3D |
| 4. | Alat Kerja | Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence | • Screenshot web aplikasi |
| 5. | Bimtek Inovasi | Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 1 kali | • Undangan Sosialisasi |

| No. | Indikator SID | Informasi | Bukti Dukung |
|---|---|---|---|
| | | bimtek (bimtek/training/TOT) | |
| 6. | Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD | - | Tidak Tersedia |
| 7. | Jejaring Inovasi | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih | • SK tentang Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (ekejap) Berbasis Website |
| 8. | Replikasi | - | Tidak Tersedia |
| 9. | Pedoman Teknis | - | Tidak Tersedia |
| 10. | Pelaksana Inovasi Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara | • SK tentang Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (ekejap) Berbasis Website |
| 11. | Kemudahan Informasi Layanan | Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode | • Dokumentasi tatap muka |
| 12. | Penyelesaian Layanan Pengaduan | - | Tidak Tersedia |
| 13. | Keterlibatan aktor inovasi | Inovasi melibatkan 3 Aktor | • Undangan Rapat |
| 14. | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | - | Tidak Tersedia |
| 15. | Layanan Terintegrasi | 0 | • Screenshot Aplikasi |
| 16. | Kecepatan penciptaan inovasi | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan | • Proposal Inovasi |
| 17. | Kemanfaatan Inovasi | Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih | Tidak Tersedia |
| 18. | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | - | Tidak Tersedia |
| 19. | Sosialisasi Inovasi Daerah | Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi | • Dokumentasi Sosialisasi |
| 20. | Video inovasi daerah | Memenuhi 5 unsur substansi | • Inovasi ekejap |
| 21. | Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah | - | Tidak Tersedia |

| No. | Indikator SID | Informasi | Bukti Dukung |
|---|---|---|---|
| | (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png | | |
| 22. | Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi | - | Tidak Tersedia |
| 23. | Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi | - | Tidak Tersedia |
| 24. | Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) | - | Tidak Tersedia |
| 25. | Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan | - | Tidak Tersedia |
| 26. | Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan | - | Tidak Tersedia |